



KINI BERJUALAN DI SIRIP-SIRIP MALIOBORO

- Para asongan yang rata-rata sudah 20 tahun lebih berjualan.
- Mereka tidak memiliki legalitas. Namun sudah ada beriringan sejak dahulu dengan para PKL.
- Jumlah: 181 orang. Berompi biru.
- Dulu berjualan dari Teteg Malioboro hingga Pasar Sore.

Klaim Mereka:

- Keberadaan pengasong telah ada kesepakatan dengan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- Bukti: setiap Selasa Wage, mereka selalu turut terlibat.

Tuntutan Mereka:

- Pemkot Jogja, Pemprov DIJ memfasilitasi ruang seperti para PKL.



GRAFIS: NERPRI KARTUN/RADAR JOGJA

Asongan Malioboro Wadul ke Dewan

Kehilangan Mata Pencarian Pasca-Relokasi PKL

JOGJA, Radar Jogja - Dampak pasca relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro masih menimbulkan keresahan bagi pedagang lain yang notabane terdampak kehilangan mata pencarian, yaitu pedagang asongan. Konsekuensi dari relokasi PKL, aktivitas pedagang asongan juga dilarang berkeliaran di pedestrian Malioboro. Mereka kemudian wadul ke DPRD Kota Jogja, kemarin (14/3) ❦

► Baca *Asongan...* Hal 3



WINDA ATIKA IRA PIRADAR JOGJA

PERJUANGKAN NASIB: Audiensi pedagang asongan dengan Ketua Pansus Penataan Malioboro DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardianto kemarin (14/3).

Asongan Malioboro Wadul ke Dewan

Sambungan dari hal 1

Ketua Komunitas Asongan Malioboro Raden Ridwan Suryo Bintoro mengatakan, larangan pedagang asongan di sepanjang Malioboro itu diterimanya sejak 1 Februari 2022 lalu, pasca-relokasi para PKL ke Teras Malioboro. Informasi larangan itu tidak diterimanya secara resmi, melainkan hanya spontanitas dari petugas.

"Pasca-relokasi kami tidak boleh berjualan. Itu tidak ada surat menyurat. Hanya tiba-tiba melalui petugas Jogoboro, kami tidak boleh masuk (keiling jualan di Malioboro). Maka kami ke sini, minta kejelasan untuk menjembatani kami," katanya usai audiensi yang diterima oleh Ketua Pansus Penataan Malioboro DPRD Kota Jogja.

Pedagang asongan menuntut kebijakan secara berkeadilan agar mereka segera bisa mengais rezeki lagi di kawasan Malioboro. Terlebih, dikatakan Ridwan, secara substansial Pergub DIJ, penataan yang ditempuh hanya menyasar PKL, bukan asongan. "Secara substansi pergub mengatakan hanya terkait dengan relokasi PKL. Tidak ada esensi yang menyebut asongan. Ya, kami meminta kejelasan terkait ini secara

hukum atau keadilan," ujarnya.

Dia tidak menampik jika para asongan yang rata-rata sudah 20 tahun lebih berjualan di sana memang tidak memiliki legalitas. Namun mereka sudah ada beriringan sejak dahulu dengan para PKL. Terlebih, kini asongan yang berjumlah 181 orang dari Teteg Malioboro hingga Pasar Sore itu sudah berseragam rompi berwarna biru semuanya.

Artinya, mereka terlihat di lapangan dan tidak terkesan kucing-kucingan. "Faktanya selama ini bertahun-tahun tidak ada persoalan dengan asongan, tapi setelah ada penataan ini kami tidak boleh lagi berjualan," jelasnya.

Klaim dari komunitas asongan pun, keberadaan mereka telah ada kesepakatan dengan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (PKCB). Dibuktikan, setiap ada kegiatan sosial seperti kebersihan Malioboro setiap Selasa Wage, para asongan turut terlibat dan berbaur dengan pedagang lain. "Kok tidak dari dulu-dulu kami diusir, baru setelah ada relokasi baru dilarang. Bentuk larangannya mana? Perda, perwal, mana enggak ada semua," tanyanya.

Oleh karena itu, mereka menuntut Pemkot Jogja maupun Pemprov DIJ bisa memfasilitasi-

si agar mendapat pekerjaan yang layak dan sesuai. Sementara ada larangan ini, mereka tetap berjualan tetapi di luar jangkauan UPT atau Jalan Malioboro. Melainkan di sirip-sirip Malioboro.

"Kami ingin ada solusi. Bagaimana pun juga kami ingin tetap bertahan hidup. Sementara kita *delik-delik* dulu, karena kalau nggak gini mereka tetap punya tanggungan dan tidak punya modal," tambahnya.

Ketua Pansus Penataan Malioboro DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardianto mengatakan, kaitan dengan solusi asongan ini tentu tidak bisa berpikir sendiri. Pihaknya harus mendiskusikan dengan jajaran lain, termasuk akan membawa aspirasinya hingga eksekutif.

"Kami akan mencoba satu sampai dua hari (komunikasi dengan eksekutif, *Red*). Ketika kawan-kawan ada di sini meminta berjualan secara resmi, tapi secara aturan tidak boleh, maka kami akan carikan solusi," katanya di sela menerima audiensi komunitas asongan di Ruang Rapat 1 Kantor DPRD Kota Jogja.

Fokki menjelaskan, polemik para asongan ini tidak jauh berbeda dengan para pendorong gerobak yang juga kehilangan

tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

berpindah-pindah tempat. "Kami tidak mengakomodasi mereka. Karena dalam posisi apa pun, mereka bisa melakukan aktivitas di manapun," kata Yeti yang dihubungi ketua pansus

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005